

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN BERBASIS AKRUAL PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA MAGELANG

Kurnia Hardjanto¹, Margaretha Kusuma P², Murjoko³

¹Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, Jl. Kartini No. 3 Magelang
kurnia_ha@yahoo.com

²Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul, Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul
margarethawangke@gmail.com

³IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Jl. Arif Rahman Hakim Telanaipura Jambi
kangmurjoko@gmail.com

ABSTRACT

Planning and activities implementation report on local governments use the information system applications. This research aims to analyze the quality of information on Financial Information Systems Management Areas (SIMDA) Accrual-based on Agriculture and Food Agency of Magelang City. The research method was a survey to respondents by filling in questionnaire research. The respondents are employees who are involved in the use of the Financial SIMDA application with the total respondents is 8 people. The data collected was analyzed using pre and post test methods. The results showed that the implementation of accrual-based Financial SIMDA increases the quality of information compared to the previous application.

Keywords: *Implementation, SIMDA, Accrual*

ABSTRAK

Perencanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan pada pemerintah daerah menggunakan aplikasi sistem informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas informasi pada Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan berbasis akrual pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang. Metode penelitian adalah survey dengan responden mengisi kuisioner penelitian. Responden adalah pegawai yang terlibat dalam penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan dengan total responden adalah 8 orang. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode pre dan post test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMDA Keuangan berbasis akrual meningkatkan kualitas informasi dibandingkan dengan aplikasi sebelumnya.

Kata Kunci: *Implementasi, SIMDA, Akrual*

I. PENDAHULUAN

Kemajuan sistem informasi di Indonesia menuntut para instansi dan lembaga untuk ikut maju dalam hal teknologi informasi. Teknologi informasi yang sudah maju menjadi salah satu kebutuhan dalam mendukung kehidupan sehari-hari [1].

Sistem informasi dan teknologi menjadi sangat penting untuk era saat ini dan berperan luas tak terkecuali bagi organisasi lingkup pemerintahan daerah, karena dapat membantu proses bisnis atau kegiatan yang terjadi hingga dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi, komunikasi, kolaborasi dan daya saing [2].

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 36 ayat (1) dan UU Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 70 ayat (2) mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam menyusun dan menyajikan laporan pendapatan dan belanja negara selambat-lambatnya pada Tahun Anggaran (TA) 2008. Sejak terbitnya paket Undang-undang di bidang Keuangan Negara, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual di Indonesia.

Pada Tahun 2005, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengatur mengenai pengakuan pendapatan dan belanja menggunakan basis kas, sedangkan untuk aset, kewajiban, dan ekuitas menggunakan basis akrual. Untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang sesuai dengan SAP, Pemerintah juga mengembangkan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat berbasis kas menuju akrual. Untuk penyeragaman mekanisme penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrual, diterbitkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan (Perdirjen) Nomor 62 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan.

Selanjutnya, pemerintah menerbitkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005. PP Nomor 71 Tahun 2010 tersebut memberlakukan SAP berbasis akrual baik untuk pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas paling lambat Tahun 2015. Pemerintah pusat telah

menyusun langkah strategis untuk melaksanakan basis akrual tersebut.

Salah satu langkah untuk melaksanakan akuntansi berbasis akrual di antaranya dengan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan. Aplikasi SIMDA merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sejak tahun 2003, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah membentuk *Satuan Tugas Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)*, dengan tugas:

1. Mengembangkan/membuat dan melakukan pemutakhiran Program Aplikasi Komputer SIMDA yang berkaitan dengan pembangunan/peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam rangka pemenuhan kebutuhan manajemen daerah, mengarah ke *grand design* dari *Database Management System (DBMS)*.
2. Memberikan bimbingan teknik/pelatihan kepada Satgas SIMDA Perwakilan BPKP yang akan ditugaskan dalam asistensi/implementasi Program Aplikasi Komputer SIMDA.
3. Membantu Satgas SIMDA Perwakilan BPKP melakukan asistensi implementasi Program Aplikasi Komputer SIMDA pada pemerintah daerah.

Tujuan pengembangan Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah adalah:

- a) Menyediakan *Database* mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, aset daerah, kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah.
- b) Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan.
- c) Mempersiapkan aparat daerah untuk mencapai tingkat penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik.
- d) Memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Untuk perencanaan dan pelaporan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah yang

relevan, akurat, dan tepat BPKP mengembangkan program aplikasi berbasis *desktop* dan *web-based* sebagai aplikasi keuangan yang digunakan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pada pemerintah daerah. Aplikasi SIMDA digunakan pada organisasi pemerintah daerah secara terintegrasi satu dengan yang lain.



Gambar 1. Aplikasi SIMDA keuangan

Seiring dengan perubahan regulasi yang ada, SIMDA Keuangan kemudian menjadi SIMDA berbasis akrual saat ini, dengan data yang telah dikerjakan oleh operator daerah akan langsung update di *server* pusat atau dengan kata lain data bersifat *real-time* dibandingkan dengan aplikasi sebelumnya (Situs Resmi BPKP). SIMDA keuangan berbasis Akrual ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan aplikasi ini, Pemda dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya. Output aplikasi ini antara lain:

- 1) Penganggaran, terdiri dari:
 - Rencana Kerja Anggaran (RKA)
 - Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
 - APBD beserta perubahannya
 - Surat Penyediaan Dana (SPD)
- 2) Penatausahaan, terdiri dari:
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
 - Surat Perintah Membayar (SPM)
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - Surat Tanda Setoran (STS)
 - Register-register
 - Formulir-formulir pengendalian lainnya
- 3) Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari
 - Jurnal
 - Buku Besar

- Buku Pembantu
- Laporan Realisasi Anggaran
- Laporan Arus Kas
- Neraca

Program aplikasi ini juga didukung dengan:

- Buku Manual Sistem dan Prosedur Penganggaran,
- Buku Manual Sistem dan Prosedur Penatausahaan
- Buku Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan.

Implementasi SIMDA keuangan berbasis akrual di Kota Magelang dilakukan sesuai dengan edaran dari pemerintah pusat, dalam hal ini BPKP. Selain fitur sistem yang telah mengikuti peraturan dan ketentuan yang terbaru, penggunaan SIMDA keuangan diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan data dan informasi tentang perencanaan dan penganggaran kegiatan pemerintahan. Analisis sistem yang baru diperlukan untuk mengetahui efektivitas sistem sebagai aplikasi untuk perencanaan dan pelaporan kegiatan dibandingkan sistem sebelumnya.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat efektivitas sistem berdasarkan penilaian terhadap kualitas informasi yang diberikan antara SIMDA keuangan sebelum dan sesudah berbasis akrual pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang. Dengan mengetahui efektivitas kedua sistem dapat digunakan sebagai dasar dalam pemanfaatan aplikasi secara lebih intensif untuk perencanaan dan penganggaran kegiatan di Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang.

1. Sistem Informasi Manajemen

Sistem terbentuk dari bagian atau elemen yang saling berhubungan dan mempengaruhi [4]. Secara umum, elemen yang membentuk sistem ada 3 macam, yaitu:

a) Masukan (*input*)

Segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem yang selanjutnya menjadi bahan untuk diproses.

b) Proses

Kumpulan bagian atau elemen yang terdapat dalam sistem yang berfungsi mengubah masukan menjadi keluaran.

c) Keluaran (*output*)

Merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem informasi, keluaran biasanya suatu informasi, saran, cetakan dan laporan.

Informasi adalah sesuatu yang bermanfaat yang dapat menambah pengetahuan penerimanya bila dibangun dari data yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Informasi juga merupakan sumber daya strategis bagi organisasi atau suatu entitas yang mendukung kelangsungan hidup organisasi. Karena itu, informasi merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan organisasi [5].

Kebutuhan informasi saat ini sangat meningkat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Informasi yang dibutuhkan tidak dilihat dari jumlah informasi yang dihasilkan, tetapi kualitas informasi tersebut. Kualitas informasi ditentukan oleh lima kriteria, yaitu ketelitian (*accuracy*), ketepatan waktu (*timeliness*), kelengkapan (*completeness*), ringkas (*conciseness*) dan kesesuaian (*relevancy*) [6].

Sistem informasi merupakan suatu sistem dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian untuk mendukung informasi yang bersifat manajerial dan kegiatan strategis dari suatu organisasi serta menyediakan informasi untuk pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan [7].

Usaha untuk memperoleh suatu informasi harus melalui suatu proses transformasi dengan membuat data menjadi bermakna. Dengan demikian untuk memperoleh suatu informasi diperlukan sumber daya *input* yang diproses menjadi *output* [4]. Proses pengolahan informasi memerlukan alat pengolah informasi yaitu *hardware*, *software* dan *brainware* [8].

Dalam organisasi terdapat tingkatan manajemen sebagai ukuran tinggi rendahnya tingkat kelompok pimpinan. Karena itu, organisasi terdiri dari unit-unit kerja. Tingkatan unit kerja dalam organisasi umumnya terdiri dari manajemen lini atas (*top management*), manajemen lini tengah (*middle management*) dan manajemen lini bawah (*low management*) [4].

Setiap tingkatan manajemen mempunyai fungsi masing-masing di antaranya adalah perencanaan strategis (*strategic planning*) merupakan fungsi manajemen lini atas, pengendalian manajemen (*management control*) merupakan fungsi manajemen lini tengah

dan pengendalian operasi (*operational control*) merupakan fungsi manajemen lini bawah.

Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah sekumpulan sistem informasi yang saling berinteraksi yang memberikan informasi baik untuk kepentingan operasi atau manajerial [9]. Secara khusus SIM adalah serangkaian subsistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu mentransformasikan data sehingga menjadikan informasi lewat serangkaian cara, guna meningkatkan produktivitas sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan [10].

SIM merupakan sistem operasional yang melakukan berbagai fungsi atau sistem yang terpadu agar memperoleh keluaran yang berguna bagi manajemen bersangkutan untuk mendukung fungsi operasi dan pengambilan keputusan. Keluaran dari SIM diharapkan dapat digunakan oleh berbagai tingkat manajemen dalam menjalankan fungsinya [11]. Dengan demikian SIM secara spesifik mempunyai karakteristik yaitu:

- 1) Beroperasi pada tugas-tugas yang terstruktur secara jelas (prosedur operasi, pengambilan keputusan dan arus informasi).
- 2) Meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya.
- 3) Menyediakan laporan dan kemudahan akses informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan secara tidak langsung manajer menggunakan laporan dan informasi untuk membuat kesimpulan dalam mengambil keputusan).

2. Penilaian Kualitas Informasi

Penilaian kualitas informasi dapat diukur dari karakteristik suatu informasi. Setiap literatur membahas karakteristik informasi yang beragam, tapi pada umumnya kualitas informasi (*quality of information*) diukur berdasarkan karakteristik ketelitian (*accuracy*), ketepatan waktu (*timeliness*) dan kesesuaian (*relevancy*) [4].

- a. Ketelitian (*accuracy*) digunakan untuk menyatakan kebenaran dan sangat menentukan kehandalan (reliabilitas) dari suatu informasi. Informasi yang dikatakan memiliki tingkat akurasi yang tinggi adalah informasi yang benar-benar bebas

dari kesalahan, baik akibat kesalahan pengumpulan data maupun kesalahan pengolahan data untuk menghasilkan informasi.

- b. Ketepatan waktu (*timeliness*) digunakan untuk menyatakan usia informasi yang sesuai dengan upaya untuk pengambilan keputusan. Informasi tidak terlambat ketika sampai ke penerima, sehingga masih ada waktu untuk menggunakan informasi tersebut sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan.
- c. Kesesuaian (*relevancy*) berarti informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi benar-benar memberikan manfaat bagi pengguna sesuai dengan kepentingannya. Relevansi informasi bagi setiap tingkat manajemen dalam organisasi sangat beragam. Karena itu, untuk menilai relevansi informasi harus berdasarkan kebutuhan informasi pada berbagai tingkat manajemen (*top management, middle management* dan *low management*).

Penelitian yang dilakukan oleh [12] mengembangkan sistem informasi audit maternal dan perinatal berbasis jaringan untuk mendukung pemantauan kematian ibu dan bayi di Dinas Kesehatan Kabupaten Buton. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian one group pre and post test. Hasil penelitian menunjukkan sistem informasi yang dikembangkan dapat menghasilkan informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu dibandingkan sistem informasi sebelumnya, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan.

Penelitian tentang penggunaan SIMDA keuangan pada pemerintah daerah dilakukan oleh [13] untuk mengetahui faktor-faktor dan nilai-nilai yang mempengaruhi penerapan SIMDA keuangan beserta kualitas informasi yang dihasilkan. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan SIMDA keuangan yaitu komunikasi, sumber daya manusia, sikap/disposisi dan struktur birokrasi. Adapun nilai-nilai yang mempengaruhi penerapan SIMDA keuangan yaitu integritas, profesionalisme, komitmen, sinergi serta kesempurnaan.

II. METODOLOGI

Penelitian dilakukan dengan survey, yaitu data diperoleh langsung dari responden dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data [14]. Penelitian survey dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penggunaan SIMDA keuangan untuk perencanaan dan pelaporan kegiatan di Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk data primer adalah dengan metode wawancara dan observasi yang dilakukan di Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang. Wawancara dilakukan langsung dengan Kepala Dinas selaku pengguna anggaran, Kepala Bidang, Sub Bagian Program dan Keuangan dan operator SIMDA keuangan. Sedangkan metode observasi dilakukan dengan pengamatan langsung pada proses *entry* data anggaran di Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang. Data sekunder antara lain diperoleh dengan dokumentasi. Jumlah responden untuk penelitian berjumlah 8 (delapan) orang. Fakta yang terkumpul, disusun, dijelaskan dan dianalisa dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas informasi laporan yang dihasilkan dari aplikasi SIMDA Keuangan dalam perencanaan dan pelaporan kegiatan. Kualitas informasi diukur dengan 3 (tiga) kriteria, yaitu kesesuaian (*relevancy*), ketelitian (*accuracy*) dan ketepatan waktu (*timeliness*). Adapun definisi operasional dan skala pengukuran ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Definisi operasional, kualitas informasi dan skala pengukuran

Kualitas Informasi	Definisi Operasional	Skala Pengukuran
Relevan	Informasi memberikan manfaat bagi pengguna	Ordinal (STS, TS, N, S, SS)
Akurasi	Ketepatan proses pengumpulan, pengolahan, penyajian data serta informasi yang dihasilkan	Ordinal (STS, TS, N, S, SS)
Ketepatan Waktu	Informasi dapat diperoleh saat dibutuhkan	Ordinal (STS, TS, N, S, SS)

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Pengukuran kualitas sistem informasi SIMDA Keuangan mengadopsi model pengujian *pre test and post test* seperti yang dikemukakan oleh Arikunto [15]. Hasil *pre test* diperoleh dari penggunaan sistem sebelumnya dan hasil *post test* diperoleh dari penggunaan SIMDA keuangan pada proses perencanaan dan pelaporan di Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara dengan responden, secara teknis aplikasi SIMDA keuangan tidak membutuhkan spesifikasi komputer yang tinggi. Sehingga tidak diperlukan biaya pengadaan *hardware* secara khusus. Untuk infrastruktur jaringan, membutuhkan jaringan yang kuat dan stabil. Aplikasi SIMDA Keuangan dilakukan secara *online-real time* yang terhubung ke *server* Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKAD) Kota Magelang. Jaringan yang ada menggunakan intranet LAN atau untuk yang di luar jangkauan dengan diberikan IP khusus. Hal ini menjadi kelemahan apabila jaringan mengalami *trouble* yang mengakibatkan tidak bisa melakukan input data.

Selain itu, karena penggunaanya banyak, sering mengakibatkan *overload* dan menjadikan akses SIMDA lambat. Aplikasi juga kadang *error*, masih ditemukan *bugs yang bersifat temporer, trouble di software* aplikasi atau sistem operasi komputer. Pada menu laporan yang dihasilkan, format laporan sudah lengkap sesuai dengan peraturan permendagri, namun masih ada beberapa format yang belum terakomodir. Menurut hasil wawancara dengan responden saat ada permintaan data keuangan di luar format baku, masih membutuhkan format manual, misalnya menginput dengan *excel*.

Aplikasi SIMDA Keuangan didesain berdasarkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti:

- Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara,
- Undang undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang perbendaharaan Negara,
- UU No. 25 tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
- UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,

- UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
- Peraturan Pemerintah RI nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah,
- PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
- PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
- PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
- PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
- Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
- Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pengelolaan barang Milik Daerah,
- Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006,
- Permendagri 20 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus,
- Permendagri 21 Tahun 2011, tentang pengelolaan keuangan daerah.
- Permendagri 32 Tahun 2011, tentang hibah dan bantuan sosial.

Penerapan SIMDA Keuangan digunakan dalam perencanaan dan pelaporan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dalam bentuk produk hukum pemerintah daerah yang berperan juga sebagai Manual Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Permendagri No.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah kegiatan pengelolaan keuangan daerah mencakup kegiatan penganggaran, penatausahaan keuangan (prosedur tata usaha keuangan penerimaan/pengeluaran kas), dan pelaporan atau prosedur akuntansi. Sementara itu, pada OPD Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang sesuai prosedur yang dicakup oleh aplikasi SIMDA Keuangan meliputi: prosedur Anggaran (RKA, DPA), prosedur pada PPK OPD (Verifikasi, Perbendaharaan, dan Akuntansi), prosedur Bendahara Pengeluaran, dan prosedur Bendahara Penerimaan. Prosedur pengelolaan keuangan dengan aplikasi SIMDA Keuangan yang akan dianalisis antara lain pada tahap penganggaran

kegiatan. Prosedur penganggaran tahap awal dalam pengolahan data keuangan, prosedur ini membentuk suatu *database* anggaran kinerja/program kegiatan SPKD atau SKPKD selama satu tahun. Di tingkat OPD prosedur penganggaran dalam aplikasi SIMDA Keuangan mencakup: Penyusunan RKA-OPD, Penyusunan Anggaran Kas dan Prosedur DPA.

Dalam penelitian ini pengujian dilakukan dengan perhitungan nilai rata-rata tertimbang sebelum dan setelah implementasi SIMDA Keuangan berbasis akrual. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan *Skala Likert*, yang terdiri dari 4 jawaban, yaitu Sangat Setuju (SS) dengan bobot 5, Setuju (S) dengan bobot 3, Netral (N) dengan bobot 2, Tidak Setuju (TS) dengan bobot 2 dan Sangat Tidak Setuju (STS) dengan bobot 1. Hasil penilaian kualitas informasi sebelum dan setelah penerapan SIMDA Keuangan berbasis akrual ditunjukkan pada Tabel 2, Tabel 3 dan Tabel 4.

Hasil evaluasi penilaian kualitas laporan keuangan Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kota Magelang dengan menggunakan Aplikasi SIMDA Keuangan berbasis akrual menunjukkan kenaikan nilai rata-rata tertimbang dari kriteria relevan, akurat, dan ketepatan waktu adalah sebesar 21,32 % yang berarti informasi yang dihasilkan oleh aplikasi SIMDA Keuangan berbasis akrual lebih berkualitas untuk mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen dibandingkan aplikasi sebelumnya. Kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan laporan keuangan yang dihasilkan aplikasi SIMDA Keuangan berbasis akrual meningkat karena aplikasi tersebut mampu menghasilkan laporan keuangan dan segala bukti pendukung yang lebih lengkap, cepat dan sesuai dengan kebutuhan untuk memantau posisi keuangan dan kinerja yang telah dicapai oleh Dinas.

Tabel 2. Pengukuran kualitas informasi sebelum (pre) penerapan SIMDA keuangan akrual

Poin Pertanyaan		STS	TS	N	S	SS	Nilai Rata-Rata Tertimbang
Relevan							
1.	Data laporan program OPD dapat diperoleh secara lengkap		3		5		3,25
2.	Data sesuai dengan kebutuhan untuk memantau penyerapan anggaran dan kinerja OPD		2		6		3,5
3.	Informasi yang dihasilkan dapat mendukung proses pengambilan keputusan		3		5		3,25
4.	Informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk analisis laporan kegiatan lebih lanjut		3		5		3,25
Sub Jumlah			11		21		3,31
Akurat							
1.	Pengolahan data dilakukan dengan prosedur yang benar dan cermat		3		5		3,25
2.	Data dapat diubah bila terjadi kesalahan				5	3	4,38
3.	Pengolahan data laporan kegiatan menjadi laporan kinerja OPD dilakukan dengan benar		3		5		3,25
4.	Informasi yang dihasilkan dapat dipercaya		2		6		3,5
Sub Jumlah			8		21	3	3,59
Ketepatan Waktu							
1.	Sistem dapat menghasilkan laporan triwulanan, bulanan dan tahunan saat dibutuhkan	1	4		3		2,62
2.	Informasi dapat diperoleh saat dibutuhkan		3		5		3,25
3.	Perencanaan anggaran dilakukan tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan		6		2		2,5
Sub Jumlah		1	13		10		2,79

Tabel 3. Pengukuran kualitas informasi setelah (post) penerapan SIMDA keuangan akrual

Poin Pertanyaan		STS	TS	N	S	SS	Nilai Rata-Rata Tertimbang
Relevan							
1.	Data laporan program OPD dapat diperoleh secara lengkap				6	2	4,25
2.	Data sesuai dengan kebutuhan untuk memantau penyerapan anggaran dan kinerja OPD				5	3	4,38
3.	Informasi yang dihasilkan dapat mendukung proses pengambilan keputusan		1		6	1	3,88
4.	Informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk analisis laporan kegiatan lebih lanjut		1		3	4	4,25
Sub Jumlah			2		20	10	4,19
Akurat							
1.	Pengolahan data dilakukan dengan prosedur yang benar dan cermat		1		4	3	4,12
2.	Data dapat diubah bila terjadi kesalahan		2		3	3	3,88
3.	Pengolahan data laporan kegiatan menjadi laporan kinerja OPD dilakukan dengan benar				4	4	4,5
4.	Informasi yang dihasilkan dapat dipercaya				5	3	4,38
Sub Jumlah			3		16	13	4,22
Ketepatan Waktu							
1.	Sistem dapat menghasilkan laporan triwulanan, bulanan dan tahunan saat dibutuhkan	1	1		5	1	3,5
2.	Informasi dapat diperoleh saat dibutuhkan		1		4	3	4,12
3.	Perencanaan anggaran dilakukan tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan		2		4	2	3,75
Sub Jumlah		1	4		13	6	3,79

Tabel 4. Hasil rekapitulasi pengukuran kualitas informasi sebelum dan setelah penerapan SIMDA keuangan akrual

Kriteria Penilaian	Sebelum Penerapan SIMDA		Setelah Penerapan SIMDA		Selisih Rata-rata Tertimbang
	Jumlah Komponen yang dinilai	Rata-rata tertimbang	Jumlah Komponen yang dinilai	Rata-rata tertimbang	
Relevan	4	3,31	4	4,19	0,88
Akurat	4	3,59	4	4,22	0,63
Ketepatan Waktu	3	2,79	3	3,79	1
Rata-rata keseluruhan		3,23		4,07	0,84

Hasil evaluasi penilaian kriteria relevan menunjukkan kenaikan nilai rata-rata tertimbang sebesar 26,59 % yang berarti informasi yang dihasilkan oleh aplikasi SIMDA keuangan berbasis akrual lebih berkualitas dalam memperoleh kelengkapan data perencanaan dan pelaporan kegiatan OPD, kesesuaian dengan kebutuhan dalam memantau penyerapan anggaran dan menilai kinerja OPD. Informasi yang dihasilkan dapat mendukung proses pengambilan keputusan dan dapat digunakan untuk analisis pelaksanaan kegiatan secara lebih sistematis dan menyeluruh.

Hasil evaluasi penilaian kriteria akurat menunjukkan kenaikan nilai rata-rata tertimbang sebesar 17,55 %. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi SIMDA keuangan berbasis akrual mampu menghasilkan informasi dengan ketepatan yang lebih baik bila dibandingkan dengan pengolahan aplikasi sebelumnya. Dengan adanya aplikasi SIMDA keuangan, pengolahan data dilakukan dengan prosedur yang lebih benar dan lebih cermat. Data juga dapat lebih mudah diubah jika terjadi kesalahan. Pengolahan data pelaksanaan kegiatan menjadi laporan kinerja OPD dapat

dilakukan dengan benar dan hasil dari informasi yang dihasilkan dapat lebih dipercaya.

Hasil evaluasi penilaian kriteria tepat waktu menunjukkan kenaikan nilai rata-rata tertimbang sebesar 35,84 % yang berarti bahwa aplikasi SIMDA Keuangan berbasis akrual mampu menghasilkan laporan pelaksanaan kegiatan dengan lebih cepat apabila dibandingkan dengan pengolahan aplikasi sebelumnya.

Peningkatan kecepatan pengolahan data dan penyajian data ini dikarenakan SIMDA Keuangan berbasis akrual merupakan aplikasi yang sudah memuat prosedur pelaporan secara keseluruhan, sehingga proses perencanaan dan pelaporan kegiatan tidak perlu melalui proses pengulangan input angka-angka atau pemindahan dari satu buku ke buku lain. Dengan adanya aplikasi SIMDA Keuangan berbasis akrual, dapat dihasilkan laporan triwulanan, bulanan dan tahunan saat dibutuhkan. Perencanaan anggaran pun dapat dilakukan tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditentukan.

IV. PENUTUP

Hal-hal yang dapat disimpulkan pada penelitian ini ialah aplikasi SIMDA Keuangan berbasis akrual yang digunakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang dapat digunakan sebagai aplikasi sistem informasi manajemen yang secara terintegratif mengelola keuangan pemerintah daerah. Prosedur pengelolaan keuangan seperti yang telah dijelaskan dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 telah diimplementasikan dengan cukup baik oleh aplikasi SIMDA keuangan. Aplikasi SIMDA keuangan menghasilkan informasi laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya dengan kualitas relevansi, akurasi dan ketepatan waktu yang lebih baik daripada pengolahan dengan sistem sebelumnya.

Penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan ini perlu juga didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dalam pengelolaan sistem informasi. Adanya kesenjangan digital (*digital divide*) yang masih dijumpai pada dinas menyebabkan keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, khususnya dalam bidang teknologi informasi. Karena itu, hal tersebut perlu diantisipasi agar dalam penggunaan SIMDA Keuangan tidak

ditemukan adanya kendala teknis dan non teknis.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. Prakoso and M. Christianti, "Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akademik dengan Studi Kasus pada Sekolah Menengah Atas Terpadu (SMAT) Krida Nusantara," *Sist. Inf.*, vol. 3 No 1, pp. 75–90, 2008.
- [2] E. L. Purba, Agastya, and A. Fuad, "Akseptansi Dan Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Akseptansi Dan Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pematang Siantar," Tesis Universitas Gadjah Mada, 2007.
- [3] "Situs Resmi BPKP." [Online]. Available: <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/Versi-2.1.bpkp>.
- [4] A. Kadir, *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi, 2002.
- [5] T. Sutabri, *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- [6] Z. Amsyah, *Manajemen Sistem Informasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- [7] Jogyanto, "Analisis dan Desain Sistem Informasi." Andi, Yogyakarta, 1999.
- [8] S. Pohan, *Pengantar Rancangan Sistem*. Jakarta: Erlangga, 1997.
- [9] L. J. Whitten, *Whitten-System Analysis*. Boston: The Mc Graw-Hill Companies, Inc., 2001.
- [10] G. Scott, *Prinsip-Prinsip Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- [11] R. McLeod, *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta, 1998.
- [12] Zakaria, "Pengembangan Sistem Informasi Audit Maternal dan Perinatal Berbasis Jaringan Untuk Mendukung Pemantauan Kematian Ibu dan Bayi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Buton," Universitas Diponegoro, 2005.
- [13] M. Dian, "Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep." Makassar, 2013.
- [14] S. Torang, *Metode Riset Struktur & Perilaku Organisasi*. Bandung: Alfabeta,

- 2012.
- [15] S. Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006.